JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

PERAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (DISTANHORBUN) KABUPATEN BOGOR DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI PERTANIAN MODERN DAN BERKELANJUTAN

Ida Efendi [1], Dadan Kurnia [2], Yovinus [3]

ABSTRACT

This article examines the role of the Head of the Food Crops, Horticulture, and Plantation Service of Bogor Regency in realizing modern and sustainable agricultural transformation. The study is grounded in the strategic importance of agriculture for regional food security, farmer welfare, and local economic resilience amid increasing pressure from land conversion, climate change, limited farmer regeneration, and uneven adoption of agricultural technology. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observation, and documentation. Informants include the Head of the Service, structural officials, agricultural extension officers, farmer group representatives, and farmers. The analysis applies Mintzberg's managerial role framework, consisting of interpersonal, informational, and decision-making roles. The findings show that the Head of the Service plays a strategic role in driving agricultural transformation. In the interpersonal role, the head of the service builds communicative, participatory, and humanistic relations with internal staff, extension officers, farmer institutions, and farmers, thereby strengthening trust and acceptance of agricultural modernization programs. In the informational role, the head of the service acts as a center for managing and disseminating policy, technology, and program information in a gradual and contextual manner. In the decision-making role, the head of the service demonstrates adaptive and participatory leadership by considering field data, input from extension officers, farmer needs, and long-term sustainability goals. However, the implementation still faces constraints such as budget limitations, broad working areas, regulatory complexity, uneven digital literacy, and limited institutional capacity among farmers. The study concludes that modern and sustainable agricultural transformation in Bogor Regency requires not only technology and mechanization, but also strong leadership, reliable agricultural data, competent extension services, empowered farmer institutions, and sustained cross- sector collaboration.

Keywords: *role of head of service, agricultural transformation, modern agriculture, sustainable agriculture, Bogor Regency.*

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, ketersediaan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

lapangan kerja, serta stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam kehidupan daerah agraris, pertanian tidak hanya dipahami sebagai aktivitas produksi pangan, tetapi juga sebagai sistem sosial-ekonomi yang melibatkan petani, kelembagaan tani, penyuluh, pemerintah daerah, pasar, teknologi, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengarahkan kebijakan, membangun kelembagaan, serta mendorong perubahan praktik pertanian agar lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

Perubahan lingkungan strategis saat ini menuntut sektor pertanian untuk melakukan transformasi. Pertanian tidak lagi cukup dijalankan dengan pola tradisional yang bergantung pada pengalaman turun-temurun, tetapi perlu bergerak menuju pertanian modern yang berbasis teknologi, data, inovasi, efisiensi produksi, dan penguatan rantai nilai. Pada saat yang sama, modernisasi pertanian tidak boleh mengabaikan prinsip keberlanjutan. Peningkatan produksi harus tetap memperhatikan kelestarian tanah, air, lingkungan, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat petani.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakter agraris kuat sekaligus menghadapi tekanan pembangunan yang kompleks. Sebagai daerah penyangga kawasan metropolitan Jabodetabek, Kabupaten Bogor menghadapi tantangan berupa alih fungsi lahan, urbanisasi, peningkatan kebutuhan pangan, perubahan iklim, serta menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Kondisi ini menempatkan pertanian Kabupaten Bogor pada posisi yang dilematis: di satu sisi sektor pertanian masih menjadi penopang pangan dan ekonomi masyarakat pedesaan, tetapi di sisi lain lahan pertanian, sumber daya manusia tani, dan daya dukung ekologisnya terus mengalami tekanan.

Dalam kondisi tersebut, transformasi pertanian modern dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Transformasi ini tidak hanya berarti penggunaan alat mesin pertanian, benih unggul, irigasi modern, atau teknologi digital, tetapi juga mencakup perubahan tata kelola pertanian. Pemerintah daerah

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

perlu memperkuat penyuluhan, meningkatkan kapasitas petani, memperkuat kelompok tani dan Gapoktan, membuka akses pembiayaan, memperluas jaringan pasar, serta memastikan data pertanian menjadi dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, transformasi pertanian harus dilihat sebagai proses perubahan menyeluruh yang menyentuh aspek teknis, kelembagaan, sosial, ekonomi, dan ekologis.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DISTANHORBUN Kabupaten Bogor memiliki posisi strategis dalam proses tersebut. Sebagai perangkat daerah yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, DISTANHORBUN memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan program pertanian, membina petani, memperkuat kelembagaan tani, memfasilitasi sarana prasarana, serta mengoordinasikan pembangunan pertanian di daerah. Namun, keberhasilan pelaksanaan mandat tersebut sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan Kepala Dinas sebagai aktor kunci yang mengarahkan organisasi, menggerakkan aparatur, membangun komunikasi, dan mengambil keputusan strategis.

Peran Kepala DISTANHORBUN menjadi penting karena transformasi pertanian tidak dapat digerakkan hanya melalui dokumen program dan instruksi birokrasi. Petani sebagai pelaku utama membutuhkan pendekatan yang komunikatif, pendampingan yang berkelanjutan, informasi yang mudah dipahami, serta keputusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Kepala dinas dituntut tidak hanya berfungsi sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membangun hubungan interpersonal, mengelola arus informasi, dan mengambil keputusan yang adaptif terhadap kebutuhan petani serta dinamika sektor pertanian.

Tesis yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa Kepala DISTANHORBUN Kabupaten Bogor menjalankan peran strategis melalui tiga dimensi utama sebagaimana dikemukakan oleh Mintzberg, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Pada dimensi interpersonal, kepala dinas membangun hubungan kerja dengan jajaran

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

internal, penyuluh, petani, dan kelembagaan tani. Pada dimensi informasional, kepala dinas berperan mengelola dan menyebarkan informasi kebijakan, teknologi, dan program pertanian. Sementara pada dimensi pengambilan keputusan, kepala dinas mengambil keputusan strategis dengan mempertimbangkan data, masukan lapangan, dan kebutuhan petani.

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis peran Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam mewujudkan transformasi pertanian modern dan berkelanjutan. Fokus kajian ini penting karena keberhasilan transformasi pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan, mengelola informasi, memperkuat kelembagaan, serta mengambil keputusan yang tepat dan berorientasi pada keberlanjutan.

b. Kerangka Teoretis

Kajian teoretis dalam artikel ini bertumpu pada konsep peran dalam organisasi publik. Peran dipahami sebagai seperangkat fungsi, tanggung jawab, tindakan, dan perilaku yang melekat pada kedudukan seseorang atau institusi dalam suatu sistem sosial dan organisasi. Dalam pemerintahan daerah, peran pejabat publik tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan tugas formal, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengarahkan, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menggerakkan perubahan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Teori utama yang digunakan adalah teori peran manajerial dari Henry Mintzberg. Mintzberg menjelaskan bahwa peran seorang pemimpin dalam organisasi dapat dilihat melalui tiga kelompok besar, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Ketiga peran ini digunakan dalam artikel untuk menganalisis bagaimana Kepala DISTANHORBUN Kabupaten Bogor menjalankan fungsi kepemimpinan dalam mendorong transformasi pertanian modern dan berkelanjutan.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

Peran interpersonal berkaitan dengan kemampuan pemimpin membangun hubungan dengan orang lain, baik dalam organisasi maupun dengan aktor eksternal. Dalam konteks DISTANHORBUN, peran interpersonal mencakup kemampuan Kepala Dinas membangun komunikasi dengan jajaran dinas, penyuluh pertanian, kelompok tani, Gapoktan, petani, serta pemangku kepentingan lainnya. Peran ini menjadi penting karena transformasi pertanian membutuhkan kepercayaan dan penerimaan dari petani. Tanpa relasi yang baik, program modernisasi pertanian mudah dipahami sebagai instruksi sepihak, bukan sebagai kebutuhan bersama.

Peran informasional berkaitan dengan kemampuan pemimpin mengumpulkan, mengolah, menyaring, dan menyebarkan informasi. Dalam sektor pertanian, informasi menjadi faktor penting karena petani membutuhkan pengetahuan mengenai teknologi budidaya, perubahan iklim, harga pasar, bantuan pemerintah, pola tanam, penggunaan sarana produksi, serta praktik pertanian berkelanjutan. Kepala Dinas perlu memastikan bahwa informasi kebijakan tidak berhenti pada level birokrasi, tetapi sampai kepada petani dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Peran pengambilan keputusan berkaitan dengan kemampuan pemimpin menentukan arah kebijakan, menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, menyelesaikan masalah, serta merespons perubahan. Dalam transformasi pertanian, keputusan Kepala Dinas menjadi penting karena sektor ini sangat dipengaruhi oleh musim, ketersediaan air, serangan hama, harga pasar, keterbatasan anggaran, dan kesiapan petani dalam menerima teknologi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus berbasis data, masukan lapangan, dan orientasi jangka panjang.

Selain konsep peran, artikel ini juga menggunakan konsep transformasi pertanian modern dan pertanian berkelanjutan. Transformasi pertanian modern dipahami sebagai proses perubahan sistem pertanian dari pola konvensional menuju sistem yang lebih efisien, berbasis teknologi, berbasis data, terintegrasi dengan pasar, dan memiliki nilai tambah. Pertanian modern tidak hanya menyangkut mekanisasi, tetapi juga menyangkut penguatan kapasitas petani, kelembagaan, pembiayaan, penyuluhan, dan pengelolaan rantai nilai.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

Sementara itu, pertanian berkelanjutan dipahami sebagai sistem pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani tanpa merusak daya dukung lingkungan. Pertanian berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. Dalam konteks Kabupaten Bogor, konsep ini menjadi relevan karena daerah menghadapi tekanan alih fungsi lahan, kebutuhan pangan yang meningkat, serta tantangan perubahan iklim. Dengan demikian, modernisasi pertanian harus diarahkan agar tidak hanya menghasilkan peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya dan keberlanjutan hidup petani.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini menganalisis peran Kepala DISTANHORBUN Kabupaten Bogor melalui tiga dimensi Mintzberg, yaitu interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Ketiga dimensi ini digunakan untuk melihat sejauh mana kepemimpinan kepala dinas mampu menjadi penggerak transformasi pertanian yang lebih modern, adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

c. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam peran Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam mewujudkan transformasi pertanian modern dan berkelanjutan. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengukuran angka semata, tetapi pada pemahaman terhadap proses kepemimpinan, pola hubungan, pengelolaan informasi, pengambilan keputusan, serta dinamika interaksi antara pemerintah daerah, penyuluh, petani, dan kelembagaan tani.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, khususnya peran Kepala Dinas dalam menggerakkan transformasi pertanian. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam pembangunan pertanian daerah. Informan meliputi Kepala

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

DISTANHORBUN Kabupaten Bogor, Sekretaris Dinas atau kepala bidang terkait program dan penyuluhan, koordinator atau penyuluh pertanian lapangan, pengurus Gapoktan, serta petani atau anggota kelompok tani. Komposisi informan tersebut dipilih agar penelitian memperoleh gambaran yang utuh, baik dari perspektif pengambil kebijakan, pelaksana teknis, maupun penerima manfaat program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check*. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu Agustus 2025 sampai Januari 2026, sebagaimana tercantum dalam jadwal penelitian tesis.

2. PEMBAHASAN

Peran Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam mewujudkan transformasi pertanian modern dan berkelanjutan dapat dipahami sebagai peran strategis kepemimpinan birokrasi daerah dalam menggerakkan perubahan sektor pertanian. Transformasi pertanian bukan hanya persoalan mengganti alat tradisional dengan alat modern, tetapi menyangkut perubahan cara berpikir, cara bekerja, cara mengambil keputusan, serta cara membangun hubungan antara pemerintah, penyuluh, petani, kelembagaan tani, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, posisi kepala dinas menjadi sangat penting karena berada pada titik temu antara kebijakan daerah, kapasitas organisasi perangkat daerah, dan kebutuhan nyata petani di lapangan.

Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang besar, khususnya pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Namun, potensi tersebut berhadapan dengan berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, keterbatasan regenerasi petani, belum meratanya adopsi

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

teknologi, keterbatasan jumlah dan kapasitas penyuluh, serta belum optimalnya kelembagaan petani sebagai organisasi ekonomi. Dalam situasi tersebut, transformasi pertanian modern dan berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya administratif, tetapi juga komunikatif, adaptif, dan mampu mengambil keputusan berbasis data serta kebutuhan lapangan. Tesis ini menunjukkan bahwa peran Kepala DISTANHORBUN Kabupaten Bogor dianalisis melalui tiga dimensi peran Mintzberg, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan.

Pertama, pada dimensi peran interpersonal, Kepala DISTANHORBUN menjalankan fungsi kepemimpinan melalui kemampuan membangun hubungan kerja dengan jajaran internal dinas, penyuluh pertanian, kelompok tani, Gapoktan, serta petani sebagai pelaku utama pertanian. Peran interpersonal ini menjadi fondasi penting karena transformasi pertanian tidak dapat dipaksakan secara birokratis. Petani tidak cukup hanya menerima instruksi untuk menggunakan teknologi baru, mengganti pola tanam, atau menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan. Mereka perlu diyakinkan, didampingi, dan dilibatkan agar perubahan tersebut dipahami sebagai kebutuhan bersama.

Kepala dinas dalam hal ini berperan sebagai pemimpin yang membangun kedekatan sosial dengan petani dan penyuluh. Kehadiran langsung di lapangan, dialog dengan kelompok tani, serta komunikasi yang terbuka menjadi bentuk konkret dari kepemimpinan yang tidak berjarak. Pendekatan tersebut penting karena sebagian petani masih memiliki keraguan terhadap program modernisasi, terutama jika program tersebut dianggap datang dari atas dan tidak selalu sesuai dengan kondisi lahan, kemampuan modal, atau kebiasaan bertani mereka. Melalui hubungan interpersonal yang kuat, kepala dinas dapat membangun kepercayaan bahwa pemerintah daerah hadir bukan hanya sebagai pemberi perintah, tetapi sebagai mitra petani dalam menghadapi perubahan.

Peran interpersonal juga terlihat dalam hubungan kepala dinas dengan penyuluh pertanian. Penyuluh merupakan ujung tombak transformasi pertanian karena merekalah yang paling dekat dengan petani dalam proses transfer

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

pengetahuan dan teknologi. Apabila penyuluh merasa didukung oleh pimpinan, maka mereka akan lebih percaya diri dalam menjalankan fungsi pendampingan. Sebaliknya, jika hubungan pimpinan dengan penyuluh bersifat kaku dan hanya administratif, maka proses penyuluhan dapat kehilangan daya dorong. Dalam konteks ini, kepala dinas berperan menjaga motivasi penyuluh, membuka ruang komunikasi, serta menjadikan masukan penyuluh sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Namun, peran interpersonal tersebut masih menghadapi kendala. Luasnya wilayah Kabupaten Bogor, banyaknya jumlah petani, keterbatasan waktu kepala dinas, dan padatnya agenda birokrasi membuat kehadiran langsung pimpinan tidak selalu dapat dilakukan secara merata. Selain itu, tidak semua petani memiliki tingkat penerimaan yang sama terhadap program perubahan. Sebagian masih berhati-hati karena pengalaman program sebelumnya yang kurang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa peran interpersonal perlu didukung oleh sistem komunikasi berjenjang yang kuat, terutama melalui penyuluh, koordinator wilayah, dan kelembagaan tani.

Kedua, pada dimensi peran informasional, Kepala DISTANHORBUN berperan sebagai pusat pengelolaan informasi kebijakan, teknologi, program, dan kebutuhan lapangan. Dalam transformasi pertanian modern, informasi menjadi modal penting. Petani membutuhkan informasi tentang benih unggul, alat mesin pertanian, pola tanam, perubahan iklim, harga pasar, akses pembiayaan, program bantuan, serta praktik budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Informasi yang tidak jelas akan menimbulkan kebingungan, sedangkan informasi yang terlambat dapat membuat petani kehilangan momentum produksi.

Kepala dinas menjalankan peran informasional dengan menyerap informasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, data internal dinas, penyuluh, dan petani, kemudian menerjemahkannya menjadi arahan program yang lebih mudah dipahami. Peran ini penting karena bahasa kebijakan sering kali terlalu teknis bagi petani. Oleh sebab itu, kepala dinas perlu memastikan bahwa informasi yang

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

disampaikan kepada petani tidak hanya benar secara administratif, tetapi juga sederhana, relevan, dan sesuai dengan konteks sosial petani.

Peran informasional ini juga berkaitan dengan konsistensi pesan. Program transformasi pertanian akan sulit berhasil apabila pesan yang diterima petani berbeda-beda antara dinas, penyuluh, dan pengurus kelompok tani. Karena itu, kepala dinas perlu menyatukan persepsi internal organisasi sebelum informasi disampaikan ke lapangan. Dalam tesis dijelaskan bahwa penyampaian informasi dilakukan secara bertahap, berulang, dan disesuaikan dengan kondisi petani. Pola ini menunjukkan bahwa informasi tidak diperlakukan sebagai instruksi satu arah, tetapi sebagai proses edukasi untuk membangun pemahaman bersama.

Meski demikian, peran informasional masih menghadapi beberapa hambatan. Tidak semua petani memiliki literasi teknologi dan literasi informasi yang sama. Sebagian petani berusia lanjut lebih nyaman dengan pola komunikasi langsung dibandingkan media digital. Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi dalam pertanian, seperti *smart farming*, sistem data pertanian, dan aplikasi digital, belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, penguatan peran informasional harus dilakukan melalui kombinasi antara komunikasi langsung, penyuluhan kelompok, media digital, dan penguatan kelembagaan tani sebagai perantara informasi.

Ketiga, pada dimensi pengambilan keputusan, Kepala DISTANHORBUN berperan dalam menentukan arah kebijakan, menetapkan prioritas program, mengalokasikan sumber daya, dan merespons permasalahan pertanian secara adaptif. Pengambilan keputusan dalam sektor pertanian memiliki karakter yang khas karena sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca, serangan hama, ketersediaan air, harga pasar, dan kesiapan petani. Karena itu, keputusan tidak dapat hanya mengandalkan prosedur administratif, tetapi harus didukung data lapangan dan masukan dari aktor yang berhadapan langsung dengan masalah.

Dalam konteks transformasi pertanian, kepala dinas dituntut mengambil keputusan yang realistis dan implementatif. Tidak semua inovasi teknologi dapat langsung diterapkan secara luas. Beberapa teknologi membutuhkan uji coba, pelatihan, kesiapan petani, dan dukungan pembiayaan. Oleh karena itu, keputusan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

yang bertahap dan terukur menjadi pilihan yang lebih tepat daripada keputusan yang terlalu cepat tetapi tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepala dinas tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pengarah perubahan yang memperhitungkan risiko dan keberlanjutan.

Peran pengambilan keputusan juga tampak dalam kemampuan kepala dinas melibatkan penyuluh, bidang teknis, dan kelembagaan petani sebagai sumber masukan. Keputusan yang melibatkan aktor lapangan cenderung lebih mudah diterima karena mencerminkan persoalan nyata petani. Selain itu, keterlibatan aktor lapangan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program, sehingga pelaksanaannya tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi komitmen bersama.

Namun, pengambilan keputusan tetap dibatasi oleh kendala struktural. Keterbatasan anggaran, regulasi lintas sektor, prosedur birokrasi, dan ketergantungan pada kebijakan tingkat pusat atau provinsi sering membatasi ruang gerak kepala dinas. Dalam beberapa kasus, kebutuhan petani bersifat mendesak, tetapi keputusan tidak dapat segera direalisasikan karena menunggu proses penganggaran atau koordinasi lintas perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan kepala dinas perlu didukung oleh tata kelola kelembagaan yang lebih lincah, kolaboratif, dan berbasis data.

Secara keseluruhan, peran Kepala DISTANHORBUN Kabupaten Bogor dalam mewujudkan transformasi pertanian modern dan berkelanjutan dapat dinilai strategis. Peran interpersonal membangun kepercayaan dan penerimaan sosial. Peran informasional memastikan kebijakan, program, dan teknologi dapat dipahami oleh petani. Sementara peran pengambilan keputusan menentukan arah, prioritas, dan respons kebijakan terhadap dinamika lapangan. Ketiga peran tersebut saling melengkapi dan menjadi fondasi penting bagi perubahan sektor pertanian di Kabupaten Bogor.

Dengan demikian, transformasi pertanian modern dan berkelanjutan tidak cukup hanya ditopang oleh program mekanisasi, bantuan sarana produksi, atau

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

pengenalan teknologi baru. Transformasi tersebut membutuhkan kepemimpinan daerah yang mampu hadir, mendengar, menjelaskan, mengoordinasikan, dan mengambil keputusan secara adaptif. Kepala DISTANHORBUN memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan, tetapi keberhasilan transformasi tetap membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat, penyuluh yang kompeten, petani yang berdaya, data pertanian yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Peran Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam mewujudkan transformasi pertanian modern dan berkelanjutan telah berjalan secara strategis melalui tiga dimensi utama, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Ketiga peran tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam menggerakkan perubahan sektor pertanian di Kabupaten Bogor.

Pada dimensi interpersonal, Kepala DISTANHORBUN mampu membangun hubungan kerja yang komunikatif, partisipatif, dan humanis dengan jajaran internal dinas, penyuluh pertanian, kelembagaan tani, dan petani. Kehadiran langsung di lapangan serta pola komunikasi yang terbuka telah membantu membangun kepercayaan petani terhadap program transformasi pertanian. Peran ini penting karena modernisasi pertanian tidak dapat dipaksakan hanya melalui instruksi birokrasi, tetapi membutuhkan penerimaan sosial dari petani sebagai pelaku utama. Dimensi informasional, Kepala DISTANHORBUN berperan sebagai pengelola dan penyampai informasi kebijakan, teknologi, dan program pertanian. Informasi disampaikan secara bertahap, sederhana, dan disesuaikan dengan kondisi sosial petani. Peran ini membantu memperkuat pemahaman petani dan penyuluh terhadap arah transformasi pertanian, meskipun masih terdapat kendala berupa kesenjangan literasi informasi, keterbatasan media komunikasi, dan belum meratanya pemanfaatan teknologi digital pertanian. Dalam dimensi pengambilan keputusan, Kepala DISTANHORBUN menunjukkan kemampuan mengambil keputusan secara adaptif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lapangan.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

Keputusan strategis tidak hanya bertumpu pada pertimbangan administratif, tetapi juga memperhatikan masukan penyuluh, kondisi petani, ketersediaan sumber daya, serta tujuan jangka panjang pembangunan pertanian. Namun, efektivitas pengambilan keputusan masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kerja, kompleksitas regulasi, dan ketergantungan pada kebijakan lintas tingkat pemerintahan.

Dengan demikian, transformasi pertanian modern dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan Kepala DISTANHORBUN dalam membangun kepercayaan, mengelola informasi, menggerakkan aparatur, serta mengambil keputusan yang realistis dan berpihak pada kebutuhan petani. Transformasi pertanian tidak cukup hanya melalui mekanisasi atau bantuan teknologi, tetapi harus didukung oleh kelembagaan yang kuat, penyuluh yang kompeten, petani yang berdaya, data pertanian yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

b. Saran

Kepala DISTANHORBUN Kabupaten Bogor perlu terus memperkuat kepemimpinan berbasis lapangan dengan menjaga intensitas komunikasi langsung bersama penyuluh, Gapoktan, kelompok tani, dan petani. Selanjutnya, DISTANHORBUN perlu memperkuat sistem informasi pertanian yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berbasis data lapangan. Informasi mengenai teknologi pertanian, harga pasar, kebutuhan sarana produksi, pola tanam, cuaca, dan program bantuan perlu disampaikan secara lebih cepat dan sederhana melalui penyuluh, kelembagaan tani, serta media digital yang sesuai dengan kapasitas petani. Selain itu, penyuluh pertanian perlu diperkuat sebagai ujung tombak transformasi pertanian. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan teknologi pertanian modern, peningkatan kemampuan komunikasi, pemanfaatan data digital, serta pendampingan yang lebih intensif kepada petani. Penyuluh tidak hanya berfungsi sebagai penyampai program, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan dan penghubung antara pemerintah dengan petani.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

Pemerintah Kabupaten Bogor juga perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor agar transformasi pertanian tidak berjalan parsial. Agenda pertanian modern dan berkelanjutan perlu dihubungkan dengan kebijakan tata ruang, perlindungan lahan pertanian, ketahanan pangan, pengembangan UMKM, pendidikan vokasi pertanian, dan pengendalian dampak perubahan iklim. Dengan penguatan tersebut, transformasi pertanian di Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Anderson, J. E. (2003). *Public policy making* (6th ed.). Houghton Mifflin.

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology, 12*, 67–92.

Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. Wiley. Bogdan,

R., & Taylor, S. (dalam Moleong, L. J.). (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Conway, G. R. (1987). The properties of agroecosystems. *Agricultural Systems, 24*(2), 95–117.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.

FAO. (2011). *Save and grow: A policymaker's guide to the sustainable intensification of smallholder crop production*. FAO.

FAO. (2017). *The future of food and agriculture: Trends and challenges*. FAO.

Gebbers, R., & Adamchuk, V. I. (2010). Precision agriculture and food security. *Science, 327*(5967), 828–831.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). *The social psychology of organizations* (2nd ed.). Wiley.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2013). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

OECD. (2016). *Innovation, agricultural productivity and sustainability*. OECD Publishing.

Pretty, J. (1997). The sustainable intensification of agriculture. *Natural Resources Forum, 21*(4), 247–256.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

Pretty, J. (2018). *Sustainable agriculture and food*. Routledge.

Ramadhan, T., & Wulandari, F. (2022). Implementasi program *smart farming* dalam mendorong pertanian modern berbasis teknologi di Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Teknologi Pertanian, 9*(1), 67–84.

Sudaryanto, T., & Swastika, D. K. S. (2011). *Modernisasi pertanian dan ketahanan pangan*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Swanson, B. E., & Claar, J. B. (2010). *The history of agricultural education and extension in the United States*. University of Illinois.

Tilman, D., Balzer, C., Hill, J., & Befort, B. L. (2011). Global food demand and the sustainable intensification of agriculture. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 108*(50), 20260–20264.

Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. J. (2017). Big data in smart farming. *Agricultural Systems, 153*, 69–80.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.

Yuliani, P., & Firmansyah, B. (2021). Peran penyuluh dalam adopsi teknologi pertanian berkelanjutan pada kelompok tani di Kabupaten Bogor. *Jurnal Penyuluhan Pertanian Indonesia, 19*(2), 89–102.

Regulasi dan Dokumen Kebijakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Bogor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor. (2024). *Rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024–2026*.

Pemerintah Kabupaten Bogor. (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2023). *Statistik daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2023). *Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Bogor*.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. (2025).

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6262

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

Dokumen program dan laporan kinerja pembangunan pertanian Kabupaten Bogor.